CHECK AND BALANCE

Oleh Nurcholish Madjid

Kita ucapkan rasa syukur *al-ḥamd-u li 'l-Lāh* karena pemilu telah berjalan baik dan relatif damai. Pemilu damai terjadi, karena sebelumnya Indonesia telah mengangsur kebebasan dalam setahun terakhir ini. Kebebasan memang merupakan hasil paling nyata dari reformasi kita. Kalau saja kebebasan ini dapat terus dijaga, sebagai bangsa, Indonesia akan maju dan kuat. Pemilu 1999 ini memang merupakan permulaan yang baik, dan menjadi petunjuk utama bahwa kebebasan rupanya mempunyai kaitan positif dengan kedamaian. Lewat pengalaman selama ini kita menjadi sadar bahwa membangun keadaban politik dan memecahkan perbedaan dapat diselesaikan lewat wacana dialog, dan musyawarah. Ini semua adalah ciri utama demokrasi.

Seorang cendekiawan A.S. Jeane Kirkpatrick mengatakan, "Pemilihan demokrasi bukan sekadar lambang...tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif dan definitif, di mana para pengambil keputusan utama dalam pemerintahan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah, menerbitkan kritik mereka dan menawarkan alternatif." Kutipan ini menegaskan bahwa demokrasi selalu bersifat dinamis. Demokrasi selalu "dalam keadaan terus bergerak," baik secara negatif (menjadi mundur) atau positif (maju). Karena itu, demokrasi tidak dapat didefinisikan "sekali untuk selarnanya." Demokrasi adalah "proses demokratisasi."

Bila suatu masyarakat berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, dan terus lebih baik lagi, maka masyarakat itu tidak lagi demokratis! Karena itu faktor eksperimentasi, dengan coba dan salah, *trial and error* adalah bagian integral dari gagasan demokrasi. Suatu sistem disebut demokratis jika ia membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus, dalam format dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) oleh masyarakat itu sendiri. Dcmokrasi yang dirumuskan "sekali untuk selamanya"-sehingga tidak memberi ruang bagi adanya perkembangan dan perubahan sesungguhnya bukanlah demokrasi, melainkan sebuah kediktatoran.

Itulah sebabnya demokrasi memerlukan adanya ideologi terbuka. Atau malah demokrasi adalah ideologi terbuka itu sendiri: sebuah ideologi yang membuka lebar pintu bagi adanya perubahan dan perkembangan lewat eksperimentasi bersama. Falsafah inilah yang membawa demokrasi sebagai satu-satunya sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri, dan membuat perbaikan dan perubahan ke arah kemajuan.

Dalam sistem demokrasi itu mutlak diperlukan pengawasan (*check*), karena demokrasi merupakan sistem yang terbuka untuk semua pemeran-serta (partisipan), dan tidak dibenarkan sama sekali diserahkan kepada keinginan pribadi atau kebijaksanaannya — betapa pun arifnya orang itu. Dan pengimbangan (*balance*), karena sistem masyarakat dapat dikatakan demokratis hanya jika terbuka kesempatan bagi setiap kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun caranya, dan tidak boleh dibiarkan adanya unsur sebagian yang mendominasi keseluruhan. Mekanisme *check and balance* inilah yang membuat demokrasi seperti dikatakan Alexis de Tocqueville, tidak menjadi "tirani mayoritas." Sebab dengan mekanisme ini terciptalah sebuah sistem yang dalam dirinya terkandung kemampuan mengoreksi dan meluruskan dirinya sendiri, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik, dan terus lebih baik.

Demokrasi memang berpangkal pada pribadi-pribadi yang "berkemauan baik." Akan tetapi karena sifatnya yang pribadi itu,

kemauan atau iktikad baik itu dapat dipandang sebagai "rahasia" yang menjadi urusan pribadi orang bersangkutan. Artinya suatu maksud baik pribadi hanya akan mempunyai fungsi sosial jika diwujudkan dalam tindakan bermasyarakat yang berdimenasi sosial juga, yang tidak dapat dipertaruhkan hanya kepada keinginan baik atau aspirasi pribadi.

Perlunya mekanisme sosial *check and balance* ini tidak boleh diremehkan, karena selalu ada kemungkinan seorang pribadi dikuasai oleh kepentingan dirinya sendiri atau didikte oleh *vested interest*-nya, menuju kepada tirani. *Check and balance* adalah mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar demi kebaikan bersama. Dan pada urutannya, proses serupa itu memerlukan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat.

Pada dasarnya, setiap pengekangan kebebasan dan pencekalan atau pelarangan berbicara dan mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipil terhadap tuntutan demokrasi. Di sinilah kita memerlukan partai oposisi, yaitu partai atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani.

Harus diakui bahwa ide tentang oposisi adalah sebuah temuan modern. Artinya, sebelum zaman modern ini ide tentang oposisi sebagai kelembagaan yang dibuat secara *deliberate* itu belum ada. Yang ada pada zaman itu ialah oposisi *de facto* yang lahirnya dan penerimaannya dalam masyarakat bersifat kebetulan, tidak sengaja, alias *accidental*. Padahal sesuatu yang terjadi hanya secara "kebetulan" — apalagi jika wujud *de facto*-nya ada tetapi pengakuan *de jure*-nya tidak ada — tidak akan berjalan efektif, malah kemungkinan justru mudah mengundang anarki dan kekacauan karena usaha-usaha *check and balance* berlangsung sekenanya, dan tidak dengan penuh tanggung jawab.

Memang prinsip-prinsip kemauan baik pribadi, komitmen sosial, dan mekanisme pengawasan dan pengimbangan melalui

kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat belumlah lengkap dan sempurna. Masih diperlukan adanya sikap tabah dan tulus untuk mendahulukan kepentingan umum dan menyisihkan kepentingan pribadi semata. Ini merupakan hal yang amat berat atas individu-individu, mengingat kecenderungan setiap orang kepada egoisme dan mendahulukan *vested interest*-nya sendiri.

Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketabahan pribadi untuk kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar. Dan ini hanya dapat diatasi jika setiap orang memahami dan menerima demokrasi sebagai pandangan hidup, atau *way of life*. Itu sebabnya demokrasi menuntut adanya tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. Keterbukaan dan kebebasan yang sejati selalu memerlukan sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap yang bebas dari egoisme dan *vested interest*.

Kita hanya akan mampu mendukung pandangan hidup demokratis kalau kita mampu meninggalkan sikap "mau menang sendiri," dan menerima ketentuan bahwa demokrasi akan menghasilkan diterimanya dan dilaksanakannya hanya sebagian dari keinginan dan pikiran kita. Dalam bahasa politiknya, itu berarti harus selalu ada kesediaan untuk membuat kompromi-kompromi. Apalagi selalu ada kemungkinan bahwa keinginan dan pikiran kita sendiri itu adalah hasil perpanjangan dari *vested interest* kita, jadi suatu egoisme, setidaknya subyektif.

Dalam demokrasi prinsip "*partial functioning of ideals*" yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya, haruslah benar-benar dimengerti, dihayati dan dipegang teguh. Sudah tentu demikian pula halnya dalam kita melakukan oposisi yang merupakan bagian amat penting dari mekanisme *check and balance*, sebagai kekuatan yang akan mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan. [❖]